

DAFTAR PUSTAKA

1. Referensi Buku

- Ahmad, A. Kadir. 2003. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Centre.
- Damsar dan Indrayani. 2016. *Pengantar sosiologi perDesaan*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Pranadamedia Group.
- Esteborg. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuntitatif*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Fox, William F. 1994. *Strategic Option for Urban Infrastruktur Managemen*. Washington D.C: The International Bank for Reconstruction and development / THE WORLD BANK
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlanga.
- Hasibuan, Albert. 1995. *Otonomi Daerah (Peluang dan Tantangan)* Jakarta: Swadaya.
- Jeddawi, Murtir. 2009. *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*. Yogyakarta: Total Media.
- Kammerhofer, Jorg. 2010. *Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective*. London & New York: Routledge.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1998. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lenggon. 2021. "Data Kependudukan Kecamatan Bataguh Keadaan Tahun 2021." Sei Lunuk.
- Malik, Khalid. 2014. *Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience*. New York: United Nations Development Programme.
- Nurman. 2015. *strategi pembangunan daerah*. jakarta: PT raja grafindo persada.

- Pambudi, Rasyd. 2003. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Off Set.
- Ramlan dan Eka N.A.M. Sihombing. 2021. *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media.
- Sabarno. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Gravika.
- Siddiq, Rifhi. 2006. *Antropologi Sosial*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Sihombing, Eka N.A.M.. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
- Subgyo, Joko. 1994. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013 *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Vaughan, Roger J. dan Robert Pollard. 1983. *Rebuilding America Council of State Planning Agencies*
- Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- WJS, Purwadarminto.1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

2. Referensi Undang-undang

- Mentri Dalam Negri Republik Indonesia. “Peraturan Mentri Dalam Negri R.I. Nomor 1 Tahun 2017” *Tentang Penataan Desa*. Jakarta: Pemerintah.
- Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 43 Tahun 2014” *Tentang Peratutan Pelaksanaan Undang-undang R.I. Nomor 6 Tahun 2014 Tentng Desa*. Jakarta: Pemerintah.

Republik Indonesia. “Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2014” *Tentang Desa 2014*. Jakarta: Pemerintah.

Republik Indonesia. “Undang-undang R.I. Nomor 6 tahun 1974” *Tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial*. Jakarta: Pemerintah.

3. Referensi Berbasis Jurnal dan Skripsi

Almahmudi, Nufti Mu'tamar. 2019. "Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Khuluqiyya*.

Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. 2016. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat PeDesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul Yogyakarta.” *Jurnal MODUS* 28, no. 2.

Eko, Sugiharto. 2007. “Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik.” *Jurnal EPP* 4, no. 2.

Fauzi, Achmad. 2019. “Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.” *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 1.

Hanum, Faridah. 2019. “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mengajukan Rancangan UU Pembentukan dan Pemekaran Serta Penggabungan Daerah Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Dalam Konteks Fiqh Siyasah”, Fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

Hidayatullah, M. Arif. 2018. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang).” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Huda, A. Faisal Yusni, Sumartono, dan Farida Nuraini. 2019. “Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa (Studi pada Desa Sumberbrantas Kota Batu)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2, no. 4.

Irfani, Nurfaqih. 2020. “Asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum” *legalisasi Indonesia* 16, no. 3.

- Samsir. 2014. “Kajian Yuridis dan Sosiologis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Baruga Riattang kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumpa.” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Alauddin Makasar.
- Shidiq Amirus. 2015. “Konsep kesejahteraan Dalam islam”, *Jurnal Equilibrium* 3, No. 2.
- Sugiarto. 2021. “Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek Siyasah Syar’iyyah”, Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negri Bengkulu.
- Sukmasari, Dahliana. 2020. ”Konsep kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-qur’an.” *Jurnal Of Qur’an and Hadis Studies* 3, no. 1.
- Suriani dan Cut Nanda Kesuma. “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal ilmiah ekonomi dan pembangunan* 4, no. 1.
- Yosephus, Silvana. 2014. “Dampak Pemekran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurus Kartu Keluarga).” *Jurnal Politico* 3, no.1.

4. Referensi Berbasis Internet

- Astriana, Widyastuti. 2012. “Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga diJawa Tengah Tahun 2009”, *Economics Depelopment Analysis Journal* 1, no 1. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj> (25 Juli 2021).
- Badan Pusat Statistik indonesia. 2021. *Jumlah Desa/kelurahan Menurut provinsi 2021*. Jakarta: BPS – Statistics Indonesia. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_public/bbEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1 (26 April 2022).
- Charles I, Jones dan Peter J. Klenow. 2016. “Beyond GDP? Welfare across countries and Time.” *American Economic Review* 106, no. 9. <http://dx.doi.org/10.1257/aer.20110236> (30 Mei 2022).

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (online), <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, (23 Juli 2021).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab Dan Hak Asasi Warga Desa)*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/176/KONSTITUSI_MASYARAKAT_DESA.pdf, hal 2 (30 mei 2022)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),(online), <https://kbbi.web.id/analisis.html>, (25 Juli 2021).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),(online),(<https://kbbi.web.id/Desa> , (25 Juli 2021).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),(online),(<https://kbbi.web.id/bangun-2> , (25 juli 2021).